

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Analysis of the Report on the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Biringkanaya District Office, Makassar City

¹Arianto Taliding*, ²Kamaruddin, ³Dicky Zulkarnain Rona Gah, ⁴Nurul Azizah

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, STIM-LPI Makassar

(*)Email Korespondensi: ariantostim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tahun 2019-2021. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode penelitian lapangan dan teknik dokumenter. Hasil penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Derajat Desentralisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Kantor Kecamatan Biringkanaya efektif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya menurut Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar belum efisien dalam membelanjakan pendapatannya menurut Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Kemudian, dari hasil perhitungan Rasio Keserasian terlihat bahwa belanja operasi mendominasi total belanja daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya dengan konsisten berada diatas 90%. Sedangkan total belanja modal mendominasi total belanja daerah dibawah 10%. Pertumbuhan pendapatan daerah dan belanja daerah juga dapat dilihat pada hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan, yakni pertumbuhan pendapatan daerah tetap berada dalam angka yang positif namun pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2021 mengarah ke angka yang negatif. Terakhir, Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan hasil perhitungan 100% yang menandakan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the report on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Biringkanaya District Office, Makassar City. The sample in this study is a report on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Biringkanaya District Office, Makassar City in 2019-2021. The data in this study were collected using filed research methods and documentary techniques. The results of the study will be analyzed by quantitative descriptive method with considering the results of the analysis of the Effectiveness Ratio of Regional Original Income, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Decentralization Degree Ratio.

The results of this study indicate that on average the Biringkanaya District Office is effective in optimizing its Original Regional Revenue according to the Effectiveness Ratio of Regional Original Income. However, the Biringkanaya District Office of Makassar City has not been efficient in spending its income according to the Regional Financial Efficiency Ratio. Then, from the calculation of the Harmony Ratio, it can be seen that operating expenditures dominate the total regional expenditures at the Biringkanaya District Office, consistently being above 90%. Meanwhile, total capital expenditure dominates total regional expenditure below 10%. The growth of regional income and regional expenditure can also be seen in the results of the Growth Ratio calculation, namely the growth of regional income remains in a positive number but the growth of regional expenditure in 2021 leads to a negative number. Finally, the Decentralization

Degree ratio shows a calculation result of 100% which indicates that the Biringkanaya District Office is able to finance regional development activities through optimizing Regional Original Revenue.

Keywords: Budget Realization Report, Regional Revenue and Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan menurut peraturan daerah. APBD menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam merencanakan kegiatan tahun yang dianggarkan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan kecuali dimasukkan dalam APBD dan laporan keuangan (Habiburrahman, 2016).

Laporan keuangan pemerintah harus mempublikasikan tujuannya adalah transparansi publik, informasi publik, tanggung jawab publik, sebagai tanda lemahnya sistem korupsi yang tidak terus berkembang, menginformasikan keputusan ekonomi, sosial dan politik, dan memberikan informasi yang digunakan untuk mengembangkan kinerja keuangan pemerintah (Yunina, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara (SAP), yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 5(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri di mana sistem akuntansi kotamadya tercakup dalam penyajian laporan keuangan berbasis aktual yaitu laporan realisasi anggaran (Yunina, 2018).

Anggaran pemerintah adalah tulang punggung administrasi publik. Investasi pemerintah daerah untuk memetakan sumber pendanaan berdasarkan potensi daerah serta kapasitas pengolahan dan pemanfaatan APBD. Anggaran memainkan peran penting sebagai alat untuk stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan anggaran merupakan alat penting untuk menentukan respon ekonomi daerah (Gusti Ayu, 2022).

Menurut Rampengan (2016), laporan pelaksanaan anggaran mencakup semua kegiatan keuangan untuk menunjukkan kesesuaian dengan APBD sehingga menyajikan ringkasan sumber, distribusi, dan penggunaan dana dalam suatu periode.

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah melebihi jumlah yang diramalkan dalam APBD. Salah satunya adalah biaya personel lebih tinggi daripada biaya modal. Beberapa wilayah administratif tersebut berada di provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Pasalnya, penggunaan APBD pada pemerintah kota belum optimal. Penggunaan anggaran yang kurang optimal merupakan salah satu aspek yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Setiani, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif di mana informasi yang diukur dalam skala numerik yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tahun 2019-2021. Data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan indikator keuangan daerah antara lain Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Fathah, 2017), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Fathah, 2017), Rasio Keserasian (Honga & Ilat, 2014), Rasio Pertumbuhan (Fathah, 2017), Rasio Derajat Desentralisasi (Marlianita dan Saleh, 2020).

HASIL

A. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD tahun 2019

$$= \frac{2.182.507.000}{1.000.000.000} \times 100\% \\ = 218,25\%$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2020

$$= \frac{2.567.032.000}{1.000.000.000} \times 100\% \\ = 256,70\%$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2021

$$= \frac{2.849.154.377}{3.000.000.000} \times 100\% \\ = 94,97\%$$

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing 218,25% dan 256,70% di mana hasil tersebut > 100% yang menandakan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar efektif dalam mengoptimalkan anggaran PADnya. Sedangkan untuk tahun 2021, hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan 94,97% di mana 94,97% < 100% yang menandakan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak efektif dalam mengoptimalkan anggaran PADnya.

B. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun

$$2019 = \frac{38.995.888.390}{2.182.507.000} \times 100\% \\ = 1.786,75\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun

$$2020 = \frac{43.587.879.442}{2.567.032.000} \times 100\% \\ = 1.697,99\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun

$$2021 = \frac{39.363.515.701}{2.849.154.377} \times 100\% \\ = 1.381,58\%$$

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2019-2021 masing-masing 1.786,75%, 1.697,99%, dan 1.381,58% di mana hasil tersebut > 100% yang menandakan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak efisien dalam membelanjakan pendapatannya.

C. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian terdiri dari :

1. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi tahun 2019

$$= \frac{38.338.724.095}{38.995.888.390} \times 100\% \\ = 98,31\%$$

Rasio Belanja Operasi tahun 2020

$$= \frac{39.536.256.077}{43.587.879.442} \times 100\% \\ = 90,70\%$$

Rasio Belanja Operasi tahun 2021

$$= \frac{38.184.693.114}{39.363.515.701} \times 100\% \\ = 97\%$$

Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi pada tahun 2019-2021 berada diatas 90% yang menandakan bahwa total belanja operasi mendominasi total belanja daerah di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mencapai lebih 90%.

2. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal tahun 2019

$$= \frac{657.164.295}{38.995.888.390} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal tahun 2020

$$= \frac{4.051.623.365}{43.587.879.442} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal tahun 2021

$$= \frac{1.178.822.587}{39.363.515.701} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal pada tahun 2019-2021 berada dibawah 10% yang menandakan bahwa total belanja modal mendominasi total belanja daerah di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar rata-rata dibawah 10%.

D. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan terdiri dari :

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2019

$$= \frac{2.182.507.000 - 2.000.000.000}{2.000.000.000} \times 100\% \\ = 9,12\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2020

$$= \frac{2.567.032.000 - 2.182.507.000}{2.182.507.000} \times 100\% \\ = 17,62\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2021

$$= \frac{2.849.154.377 - 2.567.032.000}{2.567.032.000} \times 100\% \\ = 10,99\%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2019-2021 masing-masing menunjukkan angka 9,12%, 17,62% dan 10,99%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

2. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2019

$$= \frac{38.995.888.390 - 36.255.538.390}{36.255.538.390} \times 100\% \\ = 7,56\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2020

$$= \frac{43.587.879.442 - 38.995.888.390}{38.995.888.390} \times 100\% \\ = 11,77\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2021

$$= \frac{39.363.515.701 - 43.587.879.442}{43.587.879.442} \times 100\% \\ = -9,69\%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah pada tahun 2019-2020 masing-masing menunjukkan angka 7,56% dan 11,77% yang menandakan bahwa pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2021, hasil perhitungan menunjukkan angka -9,69% yang menandakan bahwa pertumbuhan belanja daerah pada Kantor Kecamatan

Biringkanaya mengalami penurunan sebesar 9,69%.

E. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2019

$$= \frac{2.182.507.000}{2.182.507.000} \times 100\% \\ = 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2020

$$= \frac{2.567.032.000}{2.567.032.000} \times 100\% \\ = 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2021

$$= \frac{2.849.154.377}{2.849.154.377} \times 100\% \\ = 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi pada tahun 2019-2021 pada Kantor Kecamatan Biringkanaya menunjukkan hasil yang konsisten yakni 100%. Hal ini menandakan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya sangat mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD.

PEMBAHASAN

A. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tahun 2019-2021 menurut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah.

Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 dan 2020 telah memiliki efektivitas yang tinggi disebabkan dari ketertiban dan kesadaran para warga membayar retribusi daerah sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan usaha. Namun, ketertiban dan kesadaran para warga berkurang pada tahun 2021 yang sementara berada di kondisi pandemi covid-19 sehingga tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah sedikit

menurun efektivitasnya dan tidak dapat melampaui anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2021. Namun demikian, angka rasio efektivitas masih tergolong tinggi karena berada di atas 90%.

B. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah yang diterima dari Kantor Kecamatan Biringkanaya terlihat realisasi Belanja Daerah sangat besar apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah terutama pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Namun, realisasi Belanja Daerah yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Belanja Daerah. Hal ini menandakan bahwa realisasi Belanja Daerah lebih kecil daripada nilai Belanja Daerah yang dianggarkan namun penggunaannya tidak efisien apabila dibandingkan dengan pendapatan daerahnya yang nilainya lebih rendah. Kemungkinan Kantor Kecamatan Biringkanaya membiayai belanja daerahnya dengan dana dari pusat namun tidak tercatat di Laporan Realisasi Anggaran sehingga perlu pembenahan pada sistem pencatatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rasio Keserasian

Pada umumnya, proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah di antara 60-90% namun Kantor Kecamatan Biringkanaya selalu membelanjakan belanja operasinya di atas 90%. Dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Biringkanaya sangat memperhatikan belanja operasinya sehingga tetap konsisten berada di atas 90%. Hal ini mendukung hasil analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yang memperlihatkan bahwa belanja daerah sangat besar apabila dibandingkan dengan pendapatan daerahnya terutama pada belanja pegawai dan belanja barang yang merupakan komponen dari belanja operasi.

Selain Rasio Belanja Operasi, ada pula Rasio Belanja Modal yang membandingkan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya. Pada umumnya, proporsi belanja modal dengan belanja daerah berkisar antara 5-20%. Akan tetapi, dari hasil penelitian pada tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya Rasio Belanja Modal pada tahun 2020 yang masuk dalam kisaran yang tepat yakni 9,29%. Hal ini menandakan bahwa proporsi belanja modal pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tergolong rendah. Pembelanjaan untuk infrastruktur, peralatan, bangunan, dan belanja modal lainnya masih belum dapat tersalurkan dengan tepat padahal tersedia anggaran setiap tahunnya untuk belanja modal yang dimaksud.

D. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya yang tidak stabil salah satunya disebabkan karena pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada tahun 2020. Dengan adanya keadaan pandemi covid-19, semua aspek kehidupan ikut terdampak baik secara positif maupun negatif.

Demikian halnya dengan Kantor Kecamatan Biringkanaya sebagai salah satu kantor pemerintahan yang berada di lingkup Kecamatan Biringkanaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, pendapatan daerahnya juga ikut terdampak sehingga mengalami peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 3 tahun. Akan tetapi, peningkatan dan penurunan yang dialami oleh Kantor Kecamatan Biringkanaya masih berada dalam persentase positif sehingga pendapatan yang diperolehnya masih berada dalam keadaan aman.

Selain Pendapatan Daerah, dapat dihitung juga Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 berada dalam persentase yang

bernilai positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis.

Penurunan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya secara serempak terjadi pada tahun 2021. Hal ini semakin menguatkan argument bahwa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi keadaan semua sector kehidupan terutama pendapatan dan belanja daerah khususnya di Kantor Kecamatan Biringkanaya. Menurunnya realisasi pendapatan dan belanja daerah yang terjadi di Kantor Kecamatan Biringkanaya akan berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

E. Rasio Derajat Desentralisasi

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kantor Kecamatan Biringkanaya juga menampilkan sumber pendapatan instansinya hanya dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan operasionalnya. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah akan terlihat tidak efisien seperti yang disajikan pada hasil analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Kecamatan Biringkanaya belum mampu membiayai atau tidak efisien dalam membiayai belanja daerah secara keseluruhan. Akan tetapi dari sudut pandang desentralisasi, Kantor Kecamatan Biringkanaya berhasil membiayai dan mengatur pembangunan daerahnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya sendiri.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 218,25%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar

256,70%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 94,97%.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 1.786,75%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 1.697,99%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 1.381,58%.
3. Rasio Belanja Operasi pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 98,31%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 90,70%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 97%.
4. Rasio Belanja Modal pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 1,68%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 9,29%, dan pada tahun 2022 memiliki persentase sebesar 2,99%.
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 9,12%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 17,62%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 10,99%.
6. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 7,56%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 11,77%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar -9,69%.
7. Rasio Derajat Desentralisasi pada Kantor Kecamatan Biringkanaya tahun 2019 memiliki persentase sebesar 100%, pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 100%, dan pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 100%.

SARAN

Bagi Kantor Kecamatan Biringkanaya, agar memperbaiki sistem pencatatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena Pendapatan Daerah baik anggaran maupun realisasinya tidak mampu menutupi Belanja Daerah sehingga dalam menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Kantor Kecamatan Biringkanaya disimpulkan tidak efisien dalam mengoptimalkan belanja daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathah, R. Nurul. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK, Volume 8 Nomor 1*
- Gusti Ayu, dkk (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. *Economics & Education Journal, Volume 4 Nomor 1*
- Habiburrahman. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 6 Nomor 2*
- Honga, A. F. & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA, Volume 2 Nomor 4*.
- Marlianita, Y. & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal, Volume 1 Nomor 1*.
- Rampengan. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 6 Nomor 1*
- Setiani, T. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi, Volume 12 Nomor 2*
- Yunina. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, Volume 1 Nomor 2*